

ONGKOS TERSEMBUNYI EKONOMI DIGITAL

**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

**Realitas Pekerja dalam Menopang
Masa Depan Ekonomi Negara**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

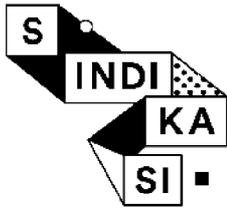
KERTAS POSISI

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
g @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

disusun oleh

Divisi Riset dan Edukasi
Serikat Pekerja dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi (SINDIKASI)

2018



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

📍 /FPSindikasi
📧 @SINDIKASI_
📞 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

I. PENDAHULUAN

Pertarungan tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin bukan persoalan baru. Kelesatan perkembangan teknologi adalah keniscayaan. Kecepatan yang ditawarkan menjadi penarik minat utama bagi yang tunduk pada logika tunggal ‘produktivitas’. Sejarah kelas pekerja adalah juga sejarah penyisihan tenaga kerja manusia lewat mesin-mesin produksi.

Pada era ini kita menghadapi persoalan yang sama dengan eskalasinya yang bombastis. Perkembangan teknologi, perangkat lunak, internet, dan robot perlahan menjadi realita keseharian—bukan lagi imajinasi futuristik yang begitu jauh di depan. Karenanya, ekonomi digital—beserta berbagai praktik turunannya—pun tak ayal diiming-iming menjadi ekonomi masa depan negara.

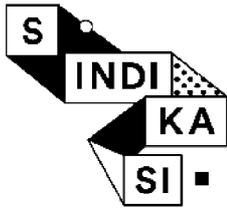
Perkembangan ini jelas memberikan peluang-peluang kerja baru. Namun, pada saat yang sama ekonomi digital memberangus pekerjaan-pekerjaan yang telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif. Tanpa adanya kesiapan yang matang dan memiliki perspektif pro-pekerja, persiapan dalam menyambut ekonomi digital hanya akan tetap menempatkan para pekerja dalam posisi yang paling rentan.

Dalam upaya untuk melakukan pemetaan terhadap implikasinya pada para pekerja, SINDIKASI melakukan Focus Group Discussion yang melibatkan para pekerja dengan berbagai latar belakang, antar lain: komunikasi digital, pegawai bank, pengemudi ojek *online*, peneliti, pengajar, manufaktur, dan sebagainya. Berbagai temuan yang diperoleh dari FGD tersebut kami paparkan dalam Bab II dan III kertas posisi ini.

Pada Bab II: Mereka yang Tersisih kita akan melihat bagaimana digitalisasi dan robotisasi telah mencabut lapangan kerja bagi para pekerja yang dianggap tidak lebih produktif dan efisien ketimbang robot-robot pekerja. Kondisi ini bukan hanya dialami oleh para pekerja manufaktur, namun juga para pekerja yang dianggap sebagai ‘pekerja kerah putih’, yakni dari sektor perbankan.

Pada Bab III: Mereka yang Rentan, kita akan melihat bagaimana ekonomi digital yang diromantisir sebagai model ekonomi masa kini hanya tengah mengulang pola eksploitasi bagi para pekerjanya. Pola eksploitasi yang paling mencolok terjadi di antara para pengemudi ojek *online* yang juga telah sama-sama menggunakan tenaga kerja manusia dalam jumlah yang massal

Kertas posisi ini kami susun dengan kesadaran bahwa tidak ada tombol ‘undo’ untuk perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ekonomi digital telah terjadi dan tidak lagi bisa dihindari. Namun, hal ini bukan sebuah alasan bagi para pemangku kepentingan untuk mengompromi pengulangan pola-pola



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

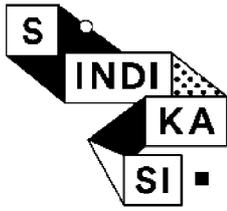
Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
t @SINDIKASI_
g @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

eksploitasi bagi para pekerja dengan hanya membentangkan karpet merah bagi pembuat kebijakan dan para pemilik modal untuk menyambut ekonomi digital, sementara para pekerja tetap disingkirkan di rantainya yang paling rentan.

Oleh karena itu, kami menutup kertas posisi ini dengan sejumlah rekomendasi terutama bagi pemerintah dan para pengusaha untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi ekonomi digital ini dengan cara pandang yang adil, dengan menempatkan perspektif kelas pekerja dalam setiap langkah yang diambil. Sebab, di balik romantisasi terhadap ekonomi digital sebagai ekonomi masa depan negara ini, para pekerja dalam posisinya yang paling rentan telah lebih dulu menjadi ongkos jalan.

Jakarta, 28 Januari 2018
Ellena Ekarahendy
Ketua SINDIKASI



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

📍 /FPSindikasi
📧 @SINDIKASI_
📞 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

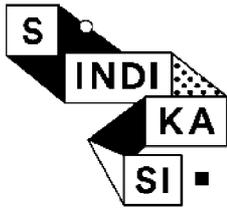
II. MEREKA YANG TERSISIH

Pada tahun 1975, sekelompok operator pres di Washington Post menyandera atasannya sembari menghancurkan komputer mesin pres yang mengancam pekerjaan mereka. Dengan keresahan yang sama, pada abad ke-19, sekelompok pekerja tekstil menghancurkan mesin tenun. Keduanya sama-sama menghancurkan teknologi sebagai bentuk protes terancamnya hak mereka sebagai pekerja. Yang perlu dicatat adalah aksi tersebut bukanlah kebencian terhadap mesin atau pun antiteknologi, melainkan sebuah tuntutan kelompok pekerja yang kehilangan mata pencaharian dan haknya begitu saja.

Sejarah pun melaju dalam lingkaran, teknologi tak berhenti lahir, dan dalam peralihannya, nasib pekerja berakhir serupa. Otomatisasi, robot, kecerdasan buatan, dan *internet of things* adalah mesin tenun dan komputer pres hari ini. Sebuah pameran perdagangan di Jerman menamainya Industry 4.0, sedikit berbeda dengan World Economic Forum yang menamainya Revolusi Industri ke-4, sementara dalam lingkup yang lebih kecil, pemerintah Indonesia menyambut perubahan ini dengan penuh semangat dalam Ekonomi Digital. Dalam laporan World Economic Forum, “Future of Jobs”, peralihan teknologi kali ini akan melahirkan 2,1 juta lapangan kerja, akan tetapi juga menghilangkan 7,1 juta yang lama. Selain itu, hubungan kerja pun akan menjadi semakin kabur dan fleksibel.

Pekerjaan yang tersisih dalam peralihan teknologi kali ini di antaranya adalah pekerjaan manufaktur dan produksi (penurunan sedang) serta peran administratif yang akan mengalami penurunan tajam. Berdasarkan keterangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dampak penyisihan yang sedang terjadi di antaranya adalah pada sektor jasa, telekomunikasi, percetakan, dan pabrik multinasional. Dari sektor telekomunikasi saja, sudah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan orang. Peralihan teknologi dalam sistem manajemen kantor juga mengakibatkan tersisihnya lapangan kerja. Sejumlah industri semen multinasional di Indonesia menggunakan aplikasi daring dalam pelaporan keuangan dan administrasi lainnya.

Berdasarkan data KSPI, ada ratusan pekerja yang kena putus hubungan kerjanya dan digantikan oleh aplikasi daring. Peralihan teknologi juga ditandai oleh peralihan sistem industri dari padat karya ke padat modal. Peralihan tersebut berdampak dini terhadap pekerja di industri elektronik yang beralih teknologi dari manual ke digital. Mesin menggantikan pekerja yang merakit. Ini terbukti dengan dikurangnya pekerja di Panasonic, serta ditutupnya pabrik Toshiba dan Phillips di Indonesia. “Toshiba tutup di Cikarang, Panasonic melakukan pengurangan, Phillips tutup. Diciptakanlah mesin menggantikan orang-orang yang melakukan perakitan. Yang paling pertama merasakan dampak ini adalah buruh,” jelas Kahar S. Cahyono.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

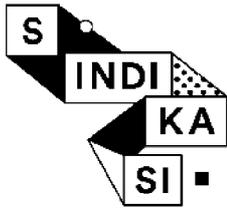
📍 /FPSindikasi
📧 @SINDIKASI_
📞 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

Badan usaha milik negara pun tak luput dari peralihan teknologi. Diberlakukannya sistem tol elektronik (*e-toll*) telah memutus hubungan kerja sebanyak 20 ribu tenaga kerja. Berdasarkan keterangan KSPI, diduga terdapat intimidasi dalam proses PHK tersebut. Kahar juga menambahkan bahwa peningkatan keahlian terhadap para pekerja yang keahliannya dapat diganti oleh teknologi bukan solusi yang jitu. Keahlian meningkat tapi lapangan pekerjaan berkurang dan jumlah pekerja tetap sama bahkan meningkat.

Pada sektor perbankan, saat ini otomatisasi merupakan peralihan teknologi yang paling berdampak terhadap penyisihan lapangan kerja. Dalam kasus Bank Permata, otomatisasi jasa pelanggan (*customer service*), berupa internet dan *online banking*, menyusutkan jumlah *customer service* yang sebelumnya dua orang per cabang menjadi satu orang saja dari keseluruhan tiga ratus cabang Bank Permata. Sementara di Bank Danamon, deklarasi perubahan dari padat karya (tenaga manusia) ke padat modal (otomatisasi) telah memutus hubungan kerja sekitar 16 ribuan karyawan. Yang disayangkan oleh serikat pekerja Bang Danamon adalah pemerintah tidak memberikan peringatan dini soal pergantian tenaga manusia dengan mesin. Cara pemutusan hubungan kerja pun tidak sesuai prosedur, melalui pesan singkat (SMS) “Terima kasih telah mengundurkan diri” ketika pada faktanya tidak ada yang mengundurkan diri.

Peralihan teknologi yang selalu mengorbankan pekerja ini memiliki dampak yang beragam. Sejumlah perusahaan meminimalisir risiko dan kerugian pekerja dengan menawarkan jaminan dan keuntungan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Namun, banyak proses lainnya yang tidak memikirkan kepentingan pekerjanya. Putus kontrak, penghentian lewat SMS, sampai intimidasi terjadi dalam prosesnya. Bahkan pada sebuah bank terdapat pelatihan cara memecat.

Hubungan kerja menjadi semakin fleksibel. Perkiraan bahwa sistem *outsourcing* akan merambah pekerja kerah putih telah terjadi di perbankan, salah satunya di Bank Danamon. *Customer service*, *teller*, dan admin Danamon menggunakan sistem kerja *outsourc*e. Selain itu, sistem magang juga semakin disalahgunakan. Sistem magang yang pada dasarnya merupakan proses belajar dijadikan sebuah skema yang menggantikan sistem kerja tetap. Menurut keterangan KSPI, dalam sistem magang ini pemegang bekerja seperti karyawan biasa namun dengan upah dan aturan yang lebih rendah. Rentang waktu magang yang biasanya terjadi dalam hitungan bulan kini boleh berlangsung setahun. Buruh-buruh banyak yang mulai digantikan dengan pemegang. Kepastian kerja tetap semakin nihil.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
@SINDIKASI_
@serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

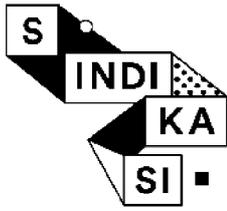
III. MEREKA YANG RENTAN

Di tahun 2016, pada kunjungannya ke Silicon Valley, Presiden Joko Widodo menyampaikan ambisi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini juga baru saja ditekankan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada World Economic Forum pada 26 Januari 2018. Pada forum yang berlangsung di Davos Swiss ini, Airlangga menyatakan bahwa Indonesia mengupayakan pemanfaatan potensi ekonomi digital sebagai solusi dalam meningkatkan sektor industri. Meskipun bidang-bidang baru yang lahir di industri ini membuka banyak lapangan pekerjaan baru, sayangnya, para pekerja yang merupakan tulang punggung dari ekonomi menanggung kerugian dan kerentanannya. Corak relasi kerja baru, regulasi yang belum memadai, perlindungan, sampai ketimpangan sosial merupakan sejumlah faktor yang perlu kita bongkar bersama-sama. Rentannya pekerja dalam ekonomi digital yang juga sering bertukar label menjadi ekonomi kreatif ini merata.

Ekonomi digital mengharuskan para pekerjanya untuk menguasai informasi. Sebelumnya kita memahami dan menghargai sebuah keahlian khusus seseorang dalam bidang profesinya. Sebagai gambaran, seorang wartawan akan fokus mengerjakan dan mendalami tugasnya untuk mencari dan melaporkan berita. Kemudian setelah berita tercetak, seorang pekerja di bagian distribusi akan mengurus penyebaran surat kabar tersebut hingga dapat sampai ke depan pintu rumah pembaca. Namun, dalam ekosistem ekonomi digital, seorang wartawan tak lagi hanya dilihat dari kelihaiannya dalam mempertajam berita, namun juga dituntut untuk dapat turut menyebarkan berita tersebut melalui media sosial. Damar Juniarto, seorang pendiri agensi digital dan mantan pekerja kreatif menggambarkan, “Bukan lagi butuh AE (*account executive*), atau tim kreatif, kita enggak lagi berpikir untuk bikin perusahaan besar, tapi yang kecil dan adaptif. Satu orang, sudah enggak lagi jelas apa *jobdesc*-nya, bisa punya dua atau tiga sekaligus. Sekarang kita tahu karyawan baru harus menguasai media sosial atau Google Analytics. Seperti jurnalis yang harus memahami SEO (*search engine optimization*) atau sedikit *coding*.”

Hal ini menjadi masalah dan ketimpangan bagi para supir transportasi online, khususnya ojek. Perwakilan dari G99 menjelaskan, “Para supir ojek online banyak yang tidak mengerti teknologi informasi, khususnya yang direkrut dari ojek pangkalan. Bagi yang mengerti aplikasi perusahaan akan memodifikasi, ini menjadi persaingan bagaimana mendapat order yang lebih banyak, yang tidak mengerti hanya mendapat sisanya.”

Sistem ekonomi yang meminta kecepatan, kuantitas tinggi, dan *multitasking* ini berakibat pada menurunnya kualitas dari produk yang dihasilkan. Seorang analis data media online menjelaskan bahwa media terlalu mendewakan *traffic*, ada target harus sekian banyak pengunjung atau *user*, sementara



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

📍 /FPSindikasi
📧 @SINDIKASI_
📞 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

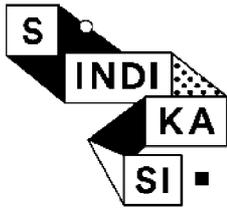
kualitas konten tidak bisa menggunakan matriks tersebut. “Orang memproduksi artikel menjadi meme, visual dengan penjelasan pendek, itu sedang marak. Ada kesulitan mencari konten yang berkualitas. Pada dasarnya, disrupsi terjadi ketika kita menurunkan kualitas konten untuk menjangkau pembaca.” Hal tersebut berakibat pada media-media yang pada akhirnya memilih untuk membuat konten yang disukai banyak orang dan menyamaratakan topik yang akan banyak dikonsumsi.

Kerentanan terbesar yang ditanggung oleh pekerja adalah aturan yang tidak jelas sehingga menyebabkan kontrak-kontrak jangka pendek dan merugikan merupakan hal yang umum. Seorang *programmer* di sebuah *start up* menjelaskan bahwa kontrak kerja yang dibuat memungkinkan seorang pekerja dapat diberhentikan kapan saja tanpa syarat yang membebaskan perusahaan. Tak seperti perusahaan-perusahaan lama yang memberi banyak benefit dan keamanan bagi pegawainya, perusahaan-perusahaan berbasis digital kerap menggunakan sistem kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Salah satu yang paling merugikan sejauh ini dalam riuhnya ekonomi digital adalah sistem perjanjian kerja bagi para supir motor ojek online. Selama ini sejumlah perusahaan transportasi online menggunakan istilah “kemitraan” bagi para supirnya. Namun, istilah tersebut bukanlah hal yang menguntungkan. Dedi dari serikat ojek online menjelaskan, “Teorinya kami sejajar, tapi di lapangan kami tidak mendapat hak-hak kami. Tidak ada kejelasan tentang tarif, baik pemerintah atau pemilik aplikasi. Dengan tarif murah, kami harus mengejar pemasukan sehari-hari. Dari PKWT ini yang paling rendah kastanya adalah sistem kemitraan yang terjadi pada 2015. *Driver* seluruh Indonesia sebanyak tiga juta, regulasi tidak ada, apakah mereka ini sektor formal atau informal”.

Ia juga menambahkan bahwa penetapan tarif per kilometer sangat tidak manusiawi dan keamanan tidak dijamin. Sebuah perusahaan transportasi online ada yang mematok harga Rp1.500,00. “Itu tarif toilet. Angka kecelakaan yang terjadi ke *driver* itu bisa ratusan setiap hari. Jamsostek enggak ada, kita lihat kalau UMR (Upah Minimum Regional) naik, tarif kami masih turun,” tambah Dedi.

Penentuan tarif dan sistem kerja aplikasi juga menjadi tangga yang menimpa para supir ojek online ini. Ia meneruskan, “Transparansinya seenaknya saja, kalau sanksi memang mereka buat tapi 50% menjebak dan merugikan *driver*. Contohnya, zona penjemputan masalah teknologi maps yang tidak sinkron, itu sangat merugikan *driver* karena harus mengambil rute lebih panjang dan memengaruhi penghasilan kami. Pak Nadiem berjanji bahwa sistem ini akan diperbaiki tapi hingga sekarang tidak. Kami sempat ke Lembaga Bantuan Hukum karena jutaan *driver* di-*suspend*, mereka itu punya simpanan sebanyak dua-tiga juta (rupiah) itu hilang. Ada empat ribu *driver*. Tapi mereka (perusahaan transportasi online) bisa bikin iklan ke mana mana.”



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

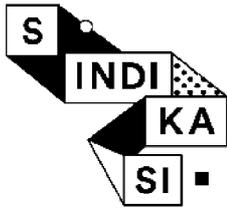
📍 /FPSindikasi
📧 @SINDIKASI_
📞 @serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

Jika para pekerja lain bisa melayangkan gugatan saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai aturan, para supir ojek online tidak bisa. Perusahaan-perusahaan transportasi online tidak memberikan salin kontrak kepada para supirnya. “Sistem perjanjiannya elektronik juga, ini kan pelanggaran. Padahal perjanjian pertamanya belum batal. Pada tahun 2015 itu (kontrak masih) pakai kertas, tahun depannya elektronik padahal kami belum sepakat untuk pindah ke elektronik,” jelas perwakilan serikat ojek online ini.

Masih alpanya regulasi yang mengatur secara utuh jalannya ekonomi digital menyebabkan banyaknya ongkos yang harus dipikul para pekerja. Meskipun cara kerja banyak yang berubah, tapi peraturan masih menggunakan yang lama. Hal ini tentu menyebabkan adanya kebolongan yang hanya menguntungkan pemilik perusahaan dan modal. “Tantangan terbesarnya adalah pasar yang *disruptive*. Kalau sekarang sedang ramai *start up* karena ingin meraih untung sebesarnya, tapi itu angka yang dikira-kira, belum fix. Kita harus bertahan dengan *budget* yang makin kecil. Perusahaan komunikasi atau *advertising* diminta bertahan dengan bujet yang tidak membesar. Hal paling berat di fase ini adalah perangkat hukum karena sekarang masih kacau. Aturan periklanan yang lama tidak ada digital dan etikanya. Yang *miss* juga ketenagakerjaan untuk perusahaan digital,” jelas Damar Juniarto.

Regulasi ini juga termasuk perlindungan terhadap kompetisi yang semakin terbuka. Ekonomi yang berbasis digital memungkinkan sistem kerja dan persaingan semakin *borderless*, datang dari mana saja. Regulasi yang lama membebankan bagi perusahaan-perusahaan baru yang berskala kecil. Belum ada regulasi yang bisa mengakomodir bentuk-bentuk baru kerja yang sudah berjalan. Pergeseran ekonomi dengan angka yang belum jelas, investor-investor kecil dan coba-coba, membuat perusahaan melakukan kontrak bertahap. Perusahaan ini tidak sanggup membayar pegawai jangka panjang, sehingga harus menggunakan sistem kontrak untuk menghindari pajak. Untuk memangkas biaya tersebut, para pegawai pun biasanya tidak memiliki asuransi kesehatan dari perusahaan.

Sebelum kita melangkah dan merayakan terlalu jauh pesatnya ekonomi digital Indonesia serta teknologi-teknologi baru di sektor lainnya, pemerintah perlu mengambil jeda. Jeda untuk mempertimbangkan sejumlah rekomendasi dari para pekerja yang merupakan tulang punggung dari ekonomi. Begitu pun dengan pengusaha dan calon pengusaha. Karena sudah semestinya teknologi yang dibuat manusia bertujuan untuk kesejahteraan manusia juga, bukan hanya segelintir manusia. Seperti yang dipaparkan oleh Hizkia Yosie Polimpung dari Koperasi Riset Purusha dalam FGD bahwa yang penting bagi kita adalah bagaimana otomatisasi ini mempermudah hidup kita, menyejahterakan kita. Dengan begitu, ambisi masa depan ekonomi Indonesia tak perlu lagi ditanggung ongkosnya oleh para pekerja.



**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

f /FPSindikasi
@SINDIKASI_
@serikatsindikasi
SINDIKASI.ORG

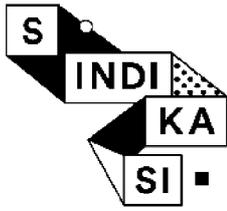
IV. REKOMENDASI

Rekomendasi bagi Pemerintah

1. Pemerintah harus membuat mekanisme penanggulangan dampak ketenagakerjaan akibat peralihan teknologi melalui hal-hal berikut.
 - a. Penugasan Unit Reaksi Cepat Kementerian Tenaga Kerja untuk spesifik menangani kasus perburuhan yang diakibatkan peralihan teknologi.
 - b. Kementerian Tenaga Kerja menyusun prasyarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan alih teknologi, antara lain:
 - *assessment* dan pelaporan dampak alih teknologi,
 - strategi mekanisme mitigasi terhadap pekerja yang tersisih akibat peralihan teknologi.
2. Pemerintah harus membuat cetak biru terkait ketenagakerjaan dalam ekonomi digital dengan melibatkan:
 - a. lembaga pemerintahan antara lain Kementerian Tenaga Kerja, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan lembaga negara lain yang relevan, dan
 - b. serikat pekerja.
3. Pemerintah harus merevisi peraturan ketenagakerjaan, antara lain: UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, PP tentang Pengupahan Nomor 78/2015, dan UU Keselamatan Kerja Nomor 1 tahun 1970.

Rekomendasi bagi Pengusaha

1. Dalam melakukan peralihan teknologi, pengusaha harus menghindari pemutusan hubungan kerja.
2. Pengusaha wajib melaporkan dampak peralihan teknologi yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja kepada pemerintah.
3. Pengusaha harus melibatkan pekerja/serikat pekerja sebelum melakukan peralihan teknologi.
4. Pengusaha wajib tunduk pada seluruh instrumen hukum terkait ketenagakerjaan.
5. Pengusaha harus menjamin kebebasan berserikat bagi para pekerjanya.



Rekomendasi bagi Pekerja

Pekerja memperkuat diri dengan berserikat untuk mengantisipasi dampak-dampak peralihan teknologi.

**Serikat Pekerja Media
dan Industri Kreatif
untuk Demokrasi**

Jalan Kalibata Timur IVG
no 10, Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12740

 /FPSindikasi
 @SINDIKASI_
 @serikatsindikasi

SINDIKASI.ORG

Sumber dan Referensi

<http://tekno.kompas.com/read/2017/11/28/10010047/yakin-ekonomi-digital-indonesia-jadi-yang-terbesar-di-asia-tenggara->

<https://katadata.co.id/berita/2018/01/26/menperin-promosikan-solusi-ekonomi-digital-di-sektor-industri>

<https://www.jacobinmag.com/2013/04/the-rise-of-the-machines>

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

TIM PENULIS

Ellena Ekarahendy | Farhanah | Ikhsan Raharjo

Informasi lebih lanjut mengenai kertas posisi ini silakan menghubungi Sekretariat SINDIKASI di nomor 0821-1245-425 atau serikat@sindikasi.org / sindikasiserikat@gmail.com